

Menyasar insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Menggerakkan Perekonomian
Di Wilayah Pinggiran Melalui
Pengembangan KEK



Penyediaan Air Untuk
Masyarakat Secara
Berkelanjutan Dan
Berkeadilan

Paket
Kebijakan
EKONOMI JILID
VI

Proses Cepat
(paperless)
Perizinan Impor
Bahan Baku Obat



indonesiabaik

Paket Kebijakan EKONOMI JILID VI

8 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam wilayah hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

1. Tanjung Lesung (Banten)
2. Sei Mangkei (Sumatera Utara)
3. Palu (Sulawesi Tengah)
4. Bitung (Sulawesi Utara)

5. Mandalika (NTB),
6. Morotai (Maluku Utara)
7. Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan)
8. Maloi Batuta Trans Kalimantan/
MBTK (Kalimantan Timur)



Paket Kebijakan EKONOMI JILID VI

Insentif kemudahan Investasi daerah KEK



Pengurangan PPh, pengurangan penghasilan netto dan penyusutan dipercepat



Tidak ada pungutan



Tarif bea masuk dengan Surat Keterangan Asal (SKA)



Paket Kebijakan EKONOMI JILID VI

Insentif Kemudahan Investasi Daerah KEK



Orang asing dapat memiliki properti



Pengurangan Pajak Hiburan dan pembangunan pada kawasan wisata



Ada dewan pengupahan dan lembaga tripartit khusus



Paket Kebijakan EKONOMI JILID VI

Insentif kemudahan Investasi daerah KEK

30
30 30
30 30

Visa kunjungan selama 30 hari,
dapat diperpanjang 5 kali



Administrator KEK dapat memberikan
izin pertanahan



Administrator KEK dapat
mengeluarkan izin prinsip dan usaha

180
menit

Percepatan perizinan maksimal 3 jam



Paket Kebijakan EKONOMI JILID VI

Regulasi Sumber Daya Air



Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP Pengusahaan SDA)



Menyusun RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM)



Memastikan bahwa badan usaha swasta tidak menguasai keseluruhan sub sistem penyelenggaraan SPAM.



Badan usaha swasta melakukan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.



Paket Kebijakan EKONOMI JILID VI

Perizinan Impor Bahan Baku Obat



342
menit

Waktu perizinan hanya 5,7 jam



Target 100% paperless



indonesiabaik